

Bab III

Pembahasan

Dalam bab III ini akan dibahas bagaimana tantangan dan hambatan dalam meliput berita dalam situasi bencana, strategi bekerjasama dengan tim dan etika media dalam peliputan bencana. Peliputan di lokasi bencana dalam praktek jurnalisme menjadi isu yang menarik, terutama bersamaan dengan semakin tingginya kesadaran akan kebencanaan di Indonesia. Bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2010, bisa dilihat sebagai salah satu bencana alam yang paling banyak mendapat liputan media, terutama media televisi. Posisi Gunung Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah memudahkan kru stasiun televisi untuk datang dengan peralatan lengkap untuk melakukan reportase langsung (*live*) melalui *Satellite News Gathering* (SNG). Selain itu, proses erupsi yang terjadi secara simultan dalam beberapa fase pra bencana menjadikan berita tentang erupsi Gunung Merapi selalu menarik bagi stasiun televisi.

Dalam tataran normatif, peliputan dan reportase di lokasi bencana sebenarnya telah diatur secara ketat. Regulasi yang bisa dirujuk adalah Pedoman Perilaku (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS) tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bab XXIV pasal 34 tentang peliputan bencana alam. Regulasi tersebut menyatakan bahwa dalam meliput dan atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut; *Pertama*, melakukan peliputan subyek yang tertimpa musibah harus mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya. *Kedua*, tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan atau keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban

mengintimidasi korban dan atau keluarganya untuk diwawancarai dan atau diambil gambarnya dan menyiarkan gambar korban dan atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan.

3.1. Tantangan dan Kesulitan dalam Jurnalisme Bencana

Secara ideal, regulasi tentang jurnalisme di lokasi bencana telah diatur samapi tataran teknis dalam PPP-SPS, namun kenyataan di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. Lokasi bencana yang rentan pada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang bukan hanya mengancam korban bencana, namun juga mengancam jurnalis yang sedang bertugas untuk melakukan peliputan dan reportase di lokasi bencana. Dinamika penyiaran televisi, yang dalam konteks pasar, memerlukan gambar dramatis juga menjadi persoalan yang muncul. Harus dipahami bahwa televisi adalah medium dingin, dimana imajinasi khalayak pada apa yang ditayangkan televisi bersifat terbatas, berbeda terbalik dengan radio yang disebut sebagai medium dingin yang memungkinkan imajinasi dari khalayak secara lebih intens.

Kesulitan peliputan televisi di lokasi bencana akan semakin terasa ketika melakukan reportase langsung dari lokasi bencana. Dalam konteks bencana, keberhasilan stasiun televisi dalam melakukan reportase langsung akan meningkatkan kepercayaan khalayak terhadap stasiun televisi bersangkutan dalam mengorganisir kemampuan untuk manajemen penyiaran. Hendrawan Setiawan menyatakan hal ini sebagai berikut :

Challage yang dihadapi dalam Merapi berbeda. Di tahun 2006, sosok Mbah Maridjan menjadi figur sentral apalagi ternyata letusan Merapi tidak seperti yang diperkirakan justru yang terjadi adalah gempa. Sedang di tahun 2010 masyarakat sudah paham teknologi apalagi ada sosial media

Pendapat senada dikemukakan oleh Lalita M. Gandaputri yang menyatakan sebagai berikut :

Saat reportase tentang Merapi saya harus menguasai aspek dasar dari bencana. Ini juga tidak cukup, karena reporter juga harus paham dengan istilah-istilah lokal. Selain itu reporter juga harus memberikan informasi yang tepat, jika tidak bisa terjadi kepanikan. Suasana yang tidak menentu saat bencana menjadikan reporter harus siap dengan segala kemungkinan.

Fungsi media dalam situasi bencana juga tidak hanya memberitakan tentang bencana yang terjadi namun lebih dari itu harus mampu memberi penguatan pada masyarakat, baik yang berada di lokasi terdampak langsung bencana maupun masyarakat yang tidak langsung terdampak. Pada konteks inilah jurnalis disebutkan oleh Hendrawan Setiawan sebagai berikut :

Pemberitaan media seharusnya memberikan empowerment kepada masyarakat. Tapi dari bencana di tahun 2010 ada pelajaran yang berharga, media harus lebih hati-hati dalam pemberitaan tentang bencana agar tidak menimbulkan kepanikan pada masyarakat akibat pemberitaan media.

Lalita M. Gandaputri menyebutkan hal ini sebagai berikut :

Reporter jangan sampai salah saat melakukan reportase. Sekali melakukan kesalahan, masyarakat bisa panik. Waktu liputan Merapi, saya selalu menyiapkan catatan kecil yang berisi informasi penting yang harus disampaikan.

Tantangan dan kesulitan dalam jurnalisme bencana ini sekaligus memperlihatkan bagaimana seharusnya posisi media dalam bencana. Media memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam peliputan peristiwa bencana. Liputan media terhadap sebuah peristiwa bencana akan memberikan penjelasan bagaimana sesungguhnya orientasi "moralitas" sebuah media; seperti yang disampaikan oleh Yao dalam artikelnya yang berjudul *Building a Coordinate System: An Ethical Framework for Analyzing Media Coverage of Disaster... Examining how the journalists behave*

in their coverage of disasters, which make the social connections more dramatic and give little time for the interest groups to respond, thus will provide a clearer picture of the media's moral orientation (Yao dan Eigenmann 2013:3). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagaimana media memberitakan tentang bencana akan nampak dalam bagaimana media menaati prinsip-prinsip atau etika; dan tidak semata-mata untuk keuntungan ekonomi politik medianya namun melanggar prinsip-prinsip tentang jurnalisme bencana; dan bahkan terkadang membuat kondisi penuh ketidakpastian karena pemberitaan yang salah atau menjadikan korban sebagai "korban" lagi karena pemberitaan media.

Pelanggaran dan motif mengejar keuntungan ekonomi politik inilah yang coba diatasi oleh jurnalis televisi yang meliput erupsi Gunung Merapi tahun 2010 dengan menekankan prinsip kehati-hatian dalam praktek jurnalisme yang mereka lakukan.

3.2. Kerjasama Tim dalam *Live* Bencana

Pada bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, peliputan langsung (*live*) di lokasi bencana oleh stasiun televisi melibatkan sejumlah kru yang diharuskan memiliki inisiatif dalam reportase. MetroTV, sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia yang secara khusus berisi berita, mengirimkan tim khusus untuk meliput bencana erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010. Tim liputan tersebut terdiri dari produser/program *director*, reporter, *camera person* dan editor. Jenis reportase *live* dianggap memiliki nilai berita yang tinggi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendrawan Setiawan dalam kapasitasnya sebagai kepala biro TVOne sebagai berikut

:

Pasti dalam live, nilai beritanya sangat tinggi apalagi jika hardnews. Karena inilah perlu standar yang ketat dalam kegiatan jurnalistik. Seperti yang

puncak Merapi. Saya saring dulu informasi tentang hujan abu tersebut dari akun sosial media terpercaya. Saya verifikasi dengan akun-akun sosial media yang ada. Selanjutnya saya coba mencari informasi dari otoritas yang berwenang. Live dilakukan jika ada kondisi baru, seperti contohnya saat ini. Ketika ada hujan abu TVOne memutuskan tidak melakukan live karena pertimbangan tidak ada yang baru dan masyarakat sudah paham. Kalau ada stasiun televisi lain melakukan live ya itu kebijakan redaksional masing-masing yang tentu sudah dipertimbangkan secara matang.

Kemampuan kerja sama dari para jurnalis dan kru liputan yang diterjunkan di lokasi bencana menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Morrison, dalam reportase langsung, kerjasama tim menjadi syarat mutlak (Morrison,2004:249). Hal ini mengindikasikan bahwa kru yang terlibat sebaiknya telah saling mengenal sehingga kegiatan reportase bisa berjalan dengan baik. Situasi yang serba tidak menentu dan sekaligus juga tidak dapat diprediksi dalam situasi bencana menjadikan aspek kerjasama dalam tim reportase langsung menjadi semakin penting.

Dalam kasus bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010, MetroTV lebih memilih untuk melibatkan kru yang berasal dari kota setempat, dalam hal ini MetroTV biro Yogyakarta, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lalita M.

Gandaputri :

Tim liputan yang berada di lokasi berasal dari Biro Yogyakarta karena dianggap lebih menguasai medan sehingga memudahkan koordinasi. Tapi keputusan mana yang harus diliput ya tetap dengan redaksi. Redaksi juga menentukan tim liputan.

Sama dengan yang dilakukan oleh MetroTV, TVOne juga memilih jurnalis dari Biro Yogyakarta, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hendrawan Setiawan sebagai berikut :

Kalau pengalaman 2010, live dilakukan dengan rapat redaksi yang memutuskan layak atau tidak untuk live. Rapat redaksi ini memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam live nantinya. Setelah rapat redaksi lalu menghubungi tim biro di daerah. Di sini sebenarnya juga masih ada diskusi

gathering, camera persons, transmitter, technical support dan maintenance. Pengalaman saat itu (2010-peneliti), kru SNG didatangkan dari Jakarta.

Pemilihan tim liputan yang berasal dari kota setempat ini tentu bisa dimaknai sebagai bagian agar tim liputan lebih mudah melakukan liputan karena lebih menguasai medan liputan. Kondisi bencana yang serba tidak menentu menjadikan tim liputan harus memiliki prasyarat menguasai medan. Sebenarnya bukan hanya dalam reportase langsung di lokasi bencana yang memiliki beragam tantangan, reportase langsung yang dilakukan dalam berbagai peristiwa memiliki tantangan yang juga beragam juga. Namun demikian, reportase langsung dari lokasi bencana, seiring dengan dinamika yang membahayakan keselamatan jiwa sekaligus dinamika tersebut tidak dapat diprediksi, menjadi lebih menantang daripada reportase pada ranah yang lain.

Reporter di lokasi bencana harus selalu melakukan *re-check* atas informasi yang mereka dapatkan. Tentang pentingnya *re-check* ini Hendrawan Setiawan menyebutkan sebagai berikut :

Reporter sebagai jurnalis harus melakukan konfirmasi sebelum live tentang informasi. Konfirmasi ini dilakukan pada otoritas-otoritas yang harus dilakukan. Asal informasi dan otoritasnya juga harus disampaikan oleh reporter saat live. Selain itu reporter juga harus paham tentang informasi yang disampaikan. Kalau reporternya sendiri tidak paham bagaimana reporter bisa melakukan reportase. Agar tidak terjadi kepanikan, konfirmasi menjadi hal yang wajib.

Bagaimanapun juga mengadakan siaran langsung merupakan kegiatan jurnalisme yang paling rumit, paling sulit dan paling dramatis dibandingkan dengan peliputan yang lain. Pengaruh yang ditimbulkan dari tayangan langsung akan lebih besar dibandingkan dengan tayangan rekaman (*tapping*) yang telah diedit dulu

Dalam reportase langsung yang ditransmisikan dari lokasi peristiwa kepada khalayak melalui teknologi televisi, kru yang berada di lokasi bencana dapat mengirimkan secara langsung apa yang terjadi secara aktual lengkap dengan visual peristiwa tersebut. Ini berbeda dengan reportase langsung yang dilakukan melalui radio, yang hanya menghadirkan aspek suara reporter dan jikapun ada suara latar, tentu tidak mampu mengalahkan dramatisasi dalam gambar. Inilah yang secara lebih jelas membedakan televisi sebagai medium dingin dan radio yang dikategorisasikan sebagai medium panas.

Ketika liputan di lokasi bencana, reporter menjadi jurnalis yang memegang peran signifikan dalam tim liputan. Reportes berhak dan wajib memberi komando pada camera person (*camper*) mengenai gambar apa yang seharusnya diambil oleh camper. Ini dilakukan agar tidak terjadi *jumping* antara apa yang disampaikan oleh reporter secara audio dan aspek visual tentang peristiwa yang terjadi. Diskusi antara reporter dan camper ini dilakukan untuk menentukan *angle* camera apa yang harus diambil oleh *camper* ketika reporter sedang memberikan reportasenya. Pada praktek jurnalisme penyiaran inilah terlihat bahwa persiapan pra liputan menjadi hal yang penting. Aspek persiapan yang matang menjadi kunci bagi praktek reportase langsung dari lokasi bencana. Ini sebenarnya juga serupa dengan siaran langsung, apapun kejadiannya, membutuhkan persiapan yang matang dan perencanaan yang teliti dan hati-hati agar mampu menghasilkan laporan yang baik dan menarik (Morrison,2004:249). Namun, suasana bencana memberikan pembedaan dengan suasana dalam peristiwa-peristiwa lain yang lain yang tidak berkaitan dengan kebencanaan.

Dalam reportase langung non bencana, urutan peristiwa dalam beberapa kasus

ditentukan oleh reporter dan camper bisa menyesuaikan. Reportase tentang

- pertandingan olahraga misalnya, sudah diketahui urutan-urutan peristiwa yang akan terjadi, seperti kapan pertandingan olahraga akan dimulai dan diakhiri, siapa saja yang terlibat dan sebagainya. Sebaliknya dalam liputan bencana, urutan-urutan peristiwa tidak bisa diprediksi sebelumnya, sehingga aspek kerjasama antara reporter dan camper dalam reportase bencana menjadi lebih penting

Dalam reportase langsung yang dilakukan secara langsung (*live on camera*), reporter melakukan pencatatan dulu tentang materi apa yang hendak disampaikan ketika nantinya *on air*. Kompetensi yang mutlak harus dikuasai oleh reporter ketika terjun ke lapangan menyangkut pada dua aspek kompetensi utama, yaitu kompetensi utama pada aspek teknis jurnalisme penyiaran dan kompetensi pada penguasaan materi tentang situasi bencana yang sedang dihadapi.

Tingkat kesulitan tinggi yang melekat pada reporter yang ditugaskan untuk melakukan reportase langsung, sekaligus bisa menjadi tolak ukur dalam kompetensi jurnalisme penyiaran di lokasi bencana yang seharusnya dimiliki oleh reporter. Berdasarkan riset yang telah dilakukan di Amerika Serikat, ditemukan fakta bahwa reporter yang melakukan siaran langsung dianggap lebih mempunyai kredibilitas dibandingkan dengan reporter yang menulis berita dari ruang berita, walaupun sebenarnya apa yang mereka tulis sebenarnya sama (Morrison, 2004:251).

Persoalan kesimpangsiuran informasi menjadi tantangan bagi reporter yang berada di lokasi bencana. Beragam rumor, yang acapkali dibumbui dengan cerita mistis, bercampur dengan informasi dari berbagai sumber. Beragamnya sumber informasi tentang bencana yang sedang terjadi mengharuskan reporter mampu memilih informasi yang layak dicatat dan untuk selanjutnya disampaikan kepada

... .. M. Candanti menyampaikan

pengalamannya: ketika melakukan reportase saat erupsi Gunung Merapi sebagai

berikut :

Waktu ada reportase Merapi ada berbagai informasi yang beredar. Saya memilih informasi yang berasal dari sumber-sumber terpercaya, seperti pemerintah daerah dan lembaga negara. Jadi reporter harus memiliki nomor telepon nara sumber terpercaya, salah satunya adalah Mbah Rono (Surono, peneliti).

Keberadaan Surono, sebagai ketua Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menjadikannya sebagai sosok yang dianggap memiliki otoritas mengenai informasi tentang perkembangan Gunung Merapi, sehingga akses informasi yang dianggap layak untuk disampaikan kepada publik adalah informasi yang disampaikan oleh Surono. Tentang figur yang dianggap memiliki otoritas dalam konteks Gunung Merapi oleh publik adalah Mbah Marijan. Sosok juru kunci Gunung Merapi ini menjadi terkenal terutama sejak erupsi Gunung Merapi di tahun 2006 menolak perintah Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk mengungsi. Cerita mistis tentang Merapi dan keberadaan sosok Mbah Marijan menjadikan Merapi penuh dengan cerita lokal dan kearifan local (*local wisdom*) yang harus dipahami oleh reporter yang diterjunkan untuk meliput erupsi Gunung Merapi.

Local wisdom dalam khazanah bencana erupsi Gunung Merapi bisa digunakan untuk menyampaikan informasi kebencanaan yang lebih mudah dipahami oleh publik dibandingkan dengan istilah teknis tentang kegunungapian yang belum banyak dipahami oleh publik. Istilah *wedhus gembel* bisa dirujuk sebagai salah satu istilah yang berakar pada kearifan lokal yang tumbuh berkembang dalam peradaban masyarakat yang hidup di sekitar Gunung Merapi.

Istilah *wedhus gembel* secara harfiah berarti kambing yang memiliki bulu-bulu

... Gunung Merapi, istilah ini dimaknai oleh

masyarakat sekitar Gunung Merapi sebagai proses keluarnya awan panas erupsi Gunung Merapi.

3.3. Etika Media Dalam Peliputan Bencana

Media memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam peliputan peristiwa bencana. Liputan media terhadap sebuah peristiwa bencana akan memberikan penjelasan bagaimana sesungguhnya orientasi “moralitas” sebuah media; seperti yang disampaikan oleh Yao dalam artikelnya yang berjudul *Building a Coordinate System: An Ethical Framework for Analyzing Media Coverage of Disaster... Examining how the journalists behave in their coverage of disasters, which make the social connections more dramatic and give little time for the interest groups to respond, thus will provide a clearer picture of the media's moral orientation* (Yao dan Eigenmann 2013:3). Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bagaimana media memberitakan tentang bencana akan nampak dalam bagaimana media menaati prinsip-prinsip atau etika; dan tidak semata-mata untuk keuntungan ekonomi politik medianya namun melanggar prinsip-prinsip tentang jurnalisme bencana; dan bahkan terkadang membuat kondisi penuh ketidakpastian karena pemberitaan yang salah atau menjadikan korban sebagai “korban” lagi karena pemberitaan media. Berkaitan dengan implementasi etika atau prinsip-prinsip media dalam peliputan bencana ini menunjukkan bahwa sebagian besar jurnalis di Indonesia masih belum memahami etika bagaimana meliput bencana terutama berkaitan dengan bencana alam. Kondisi tersebut diakibatkan beberapa hal antara lain :

- 1) Masih rendahnya pemahaman jurnalis dalam memahami prinsip-prinsip atau etika dalam meliput bencana. Para jurnalis memiliki anggapan bahwa meliput peristiwa

berlatar belakang pendidikan jurnalis menjadi salah satu faktor rendahnya pemahaman jurnalis tentang etika atau prinsip-prinsip bagaimana meliput peristiwa bencana. Selain latar belakang pendidikan jurnalis, juga dipengaruhi oleh faktor bahwa media di mana para jurnalis bekerja tidak memberikan informasi kepada wartawannya etika menulis peristiwa bencana. Tidak ada proses internalisasi tentang etika atau prinsip-prinsip dalam menulis peristiwa bencana yang dilakukan oleh pengelola media.

- 2) Faktor lainnya adalah isu peliputan bencana di media masih menjadi isu yang baru di kalangan jurnalis dan dalam kajian-kajian di dunia akademis di Indonesia. Para jurnalis belum menginternalisir prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam meliput peristiwa bencana. Meskipun kajian tentang etika dan bencana sebenarnya sudah lama ini menjadi bahan kajian di tingkat dunia. Pada tahun 1950an. Sejak tahun 1950 an kebutuhan pertimbangan moral dan tanggungjawab tumbuh secara kuat dan cepat. Etika jurnalistik ini dibutuhkan tidak hanya kredibilitas pemberitaan pada audien namun juga kepentingan koordinasi dari berbagai sudut termasuk jurnalis sendiri.

Akibat dari awak media yang tidak memahami tentang etika atau prinsip-prinsip dalam memberitakan peristiwa bencana maka dampak yang akan mungkin terjadi antara lain :

1. Penyajian berita kepada audiens atau publik tidak akurat dikarenakan data-data tidak didasarkan pada fakta-fakta yang terdapat di lapangan sehingga tidak memenuhi unsur menjawab rasa ingin tahu publik terhadap sebuah peristiwa bencana. Bahkan yang lebih membahayakan jika ternyata berita

2. Bagi media, *bad news is good news*. Demikian dalam memberitakan atau meliput bencana, awak media seringkali memfokuskan pada penonjolan berita yang mengharu biru dan dramatis dan melupakan peristiwa-peristiwa yang menjadi kepentingan publik.
3. Melakukan eksploitasi terhadap korban dalam menyajikan berita. Dikarenakan ketidaktahuan awak media menyebabkan mereka menjadikan korban bencana sebagai fokus pemberitaan dan justru terjebak dalam eksploitasi terhadap korban. Terkadang korban dimintai keterangan dengan diwawancarai berulang-ulang untuk mengisahkan penderitaannya akibat bencana baik karena kehilangan anggota keluarganya atau harta bendanya. Dalam hal ini media justru menjadikan korban sebagai komoditas untuk menarik audiens dikarenakan fokus pada derita korban bencana alam
4. Berkaitan dengan komodifikasi terhadap peristiwa bencana dalam point 3 tersebut, dalam peristiwa bencana di Aceh dan Yogyakarta, media menjadi agen yang menggalang dana dan kemudian disalurkan kepada korban bencana sekaligus sebagai sarana promosi bagi media tersebut. Media akan memberitakan peristiwa bencana secara dramatis dan mengumumkan kalau menerima sumbangan dari pemirsa yang akan disalurkan kepada korban bencana. Tindakan ini sebenarnya tidak etis dikarenakan media memanfaatkan peristiwa bencana untuk secara tidak langsung membangun citra media tersebut dengan menggalang dana publik dan menyalurkan kepada korban. Dalam proses penyaluran dana bencana pasti tidak terlepas dari logo dan nama media tersebut dan mempublikasikan prosesi-prosesi pemberian bantuan agar

Secara khusus dalam liputan media dalam kondisi bencana berkaitan dengan kesehatan termasuk petugas kesehatan menunjukkan bahwa media sering kali tidak melakukan laporan secara kontinu terhadap perkembangan pengobatan atau *treatment* yang dilakukan petugas kesehatan di lokasi bencana, seperti yang ditulis oleh Wessely berikut ini :

Wessely is still the expert on this phenomenon; in an editorial on responding to MPI episodes, he writes: "But we rarely, if ever, hear about incidents handled sensitively, with no long-term repercussions involving ill and embittered people and ambitious investigative reporters. Should we investigate at all? Does the deployment of large numbers of emergency and public health specialists merely add fuel to the fire, convincing people that there really is something serious going on?" (26, p. 130).³

Bahkan ketika dalam sebuah bencana terjadi pengiriman besar-besaran tenaga kesehatan di lokasi bencana, media seringkali tidak melaporkan bagaimana dampaknya bagi masyarakat baik secara positif maupun negatif. Secara khusus Wessley mempertanyakan dalam artikelnya tentang peran media pada terjadinya bencana, apakah dalam pengiriman atau penyebaran tenaga kesehatan apakah sebuah hal yang serius dilakukan atautkah hanya akan memercikkan bensin dalam api, di dalam sebuah kondisi bencana yang terjadi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa media seharusnya memiliki peran untuk memonitor dan melaporkannya kepada publik dengan perspektif kepentingan publik baik kepentingan untuk mendapatkan informasi yang benar maupun kepentingan untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman (tidak panik) dalam melihat fenomena bencana.

³ Peter Vasterman ¹, C. Joris Yzermans ² and Anja J. E. Dirkzwager ² The Role

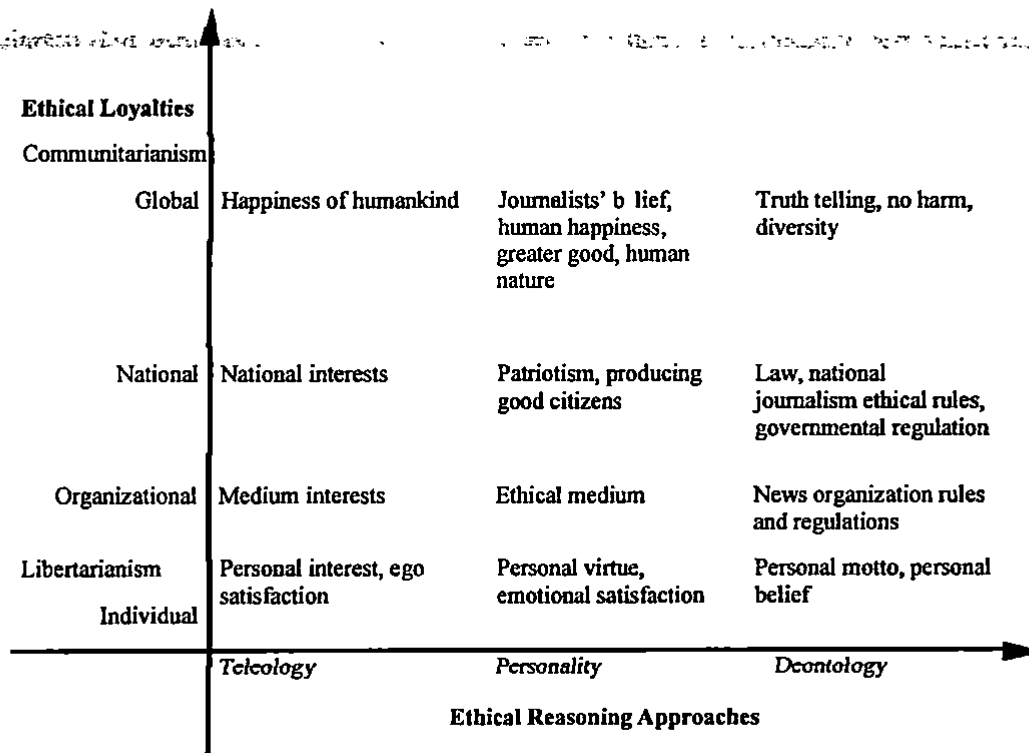
Dalam beberapa kasus tentang bagaimana media sebaiknya meliput bencana setelah peristiwa bencana, Terry Anzur menggambarkan bahwa seringkali terjadi perbedaan perspektif antara petugas kesehatan dan jurnalis.

Bagi jurnalis, berita adalah tentang konflik. Dalam memandang kerusakan akibat bencana, jurnalis akan senang dengan berita atau gambar-gambar yang menunjukkan kerusakan akibat bencana, melaporkan jumlah kerugiannya; sementara itu petugas kesehatan menekankan perlindungan dan pemulihan korban bencana; seperti dalam kutipan di bawah ini :

The role of the media in the aftermath of disasters always involves stress for public health officials. Terry Anzur describes the diverse perspectives of the journalist and public health officials: "To the journalist, news is about conflict. The reporter strives not only to assess the loss of lives and property, but also to determine if the damage could have been prevented and who is to blame. The television journalist also must find the pictures that tell the most compelling story, even when the images are disturbing. To the public health professional, news is about the absence of conflict. Loss of life is minimized and injured survivors receive prompt and appropriate treatment. These contracting agendas clash when TV-reporters and public health professionals are thrown together in the midst of a disaster. The reporter is drawn to the danger and drama, while health professionals emphasize prevention, reassurance and recovery" (2004: 197).

Selanjutnya berkaitan dengan etika media dalam meliput kondisi bencana ini, Yao dalam artikelnya yang berjudul *Building a Coordinate System: An Ethical Framework for Analyzing Media Coverage of Disaster (2013)* memberikan ilustrasi tentang bagaimana etika framework dalam peliputan bencana, seperti dalam bagan berikut ini :

Figure 1: Disaster Coverage Framework: An Ethical Coordinate System



Note: The ethical coordinate system is developed by using the ethical reasoning approaches on the horizontal axis, and the ethical loyalties on the vertical axis. Twelve specific ethical orientations are generated, which can be used to conduct comprehensive ethical analyses.

Bagan di atas menunjukkan bahwa level-level loyalitas etika berkaitan dengan liputan media dalam bencana diawali pada level individu seperti minat pribadi dan kepuasan pribadi (teleology), kemudian level organisasi termasuk dalam hal ini berkaitan dengan aturan-aturan organisasi, level nasional berkaitan dengan hukum, etika dan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan level terakhir adalah level global berkaitan dengan nilai-nilai universal tentang kemanusiaan, kemudian adanya prinsip untuk menetapkan hubungan yang sesungguhnya dan keragaman (*diversity*)